

**KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
SARANA PRASARANA SEKOLAH**

(Sudi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ZAKARIANSYAH

NPM. 201851055

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Zakariansyah
NPM : 201851055
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA SEKOLAH (Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 20 Juli 2025

Yang menyatakan,



Zakariansyah
NPM. 201851055

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA SEKOLAH (Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas)

DISUSUN OLEH : ZAKARIANSYAH
NPM. 201851055

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Wempi Feber, S.Sos., M. Si
NIDN. 1113027101 | 1.  |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Kartini Maharani, S.I.P., M. Si
NIDN. 1122049201 | 2.  |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | K Rapiandi Isak Merang, M.PD
NIDN. 1104048802 | 3.  |

Tanjung Selor, 23 Juli 2025

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan



Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Meningkatkan Infrastrktur Sarana Prasarana Sekolah (Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P.,M.M. selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S.Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S.Sos. M.I.P. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak K Rapiandi Isak Merang, S, Pd., M. Pd. selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Bapak Wempi Feber, S.Sos, M. Si selaku penguji 1 dan Ibu Kartini Maharani Abdul, S.I.P., M. Si selaku penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua, kak, dan teman – teman memberikan dukungannya;
8. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penmulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 23 Juli 2025

Penulis

Zakariansyah

**KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SARANA
PRASARANA SEKOLAH
SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS**

**Oleh :
Zakkariansyah
NPM. 201851055
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan Juni 2024 hingga selesai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan berawal dari keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan mencakup rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas penunjang, pengadaan mengajar belajar dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, optimalisasi Dana BOS untuk pemeliharaan, serta monitoring dan pendampingan teknis. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar, ketersediaan sarana praktik, dan motivasi siswa. Namun, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan anggaran, hambatan geografis, keterlambatan pencairan dana, dan rendahnya kapasitas teknis pengelola sekolah. Keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kesimpulannya, kebijakan Dinas Pendidikan telah mengarah pada peningkatan infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas, namun memerlukan perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, dan strategi pembiayaan berkelanjutan.

Kata kunci : Kebijakan pendidikan, infrastruktur sekolah, sarana prasarana, SMA Negeri 1 Tanjung Palas

***NORTH KALIMANTAN PROVINCE'S EDUCATION AND
CULTURE OFFICE POLICY ON IMPROVING SCHOOL
INFRASTRUCTURE SENIOR HIGH SCHOOL STATE
SENIOR HIGH SCHOOL 1 TANJUNG PALAS***

***By :
Zakariansyah
NPM. 201851055
State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University***

ABSTRACT

This research was conducted at SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Tanjung Palas District, Bulungan Regency, from June 2024 until completion. The aim of the study was to examine the policies of the Education and Culture Office of North Kalimantan Province in improving the infrastructure and facilities at SMA Negeri 1 Tanjung Palas, as well as to identify the factors influencing them. The problem arose from the limited educational facilities such as classrooms, laboratories, libraries, and other supporting infrastructure, which affect the quality of learning. This study employed a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and document studies.

The results indicate that the implemented policies include classroom rehabilitation, construction of supporting facilities, procurement of furniture and technology-based learning equipment, optimization of BOS (School Operational Assistance) funds for maintenance, and technical monitoring and assistance. These policies have had a positive impact on learning comfort, the availability of practical facilities, and student motivation. However, the implementation is still constrained by limited budgets, geographical challenges, delays in fund disbursement, and the low technical capacity of school management. The success of the program is influenced by factors such as communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. In conclusion, the policies of the Education Office have led to improvements in the infrastructure of SMA Negeri 1 Tanjung Palas, but require data-based planning, cross-sector coordination, and sustainable financing strategies to achieve optimal outcomes.

Keywords : Education policy, school infrastructure, facilities, SMA Negeri 1 Tanjung Palas

RIWAYAT HIDUP

Zakariansyah, lahir di Bulungan 13 Maret 1998 di Tanjung Selor, merupakan anak ketiga dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bernama Bapak Herman B dan Jamiah.

Menempuh Pendidikan di SDN 006 Tanjung Palas Hilir pada tahun 2007 dan lulus pada 2012. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tanjung Palas dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMKN 1 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep	6
2.2. Penelitian Terdahulu.....	6
2.3. Kajian Teoritis.....	8
2.3.1. Pengertian Kebijakan.....	8
2.3.2. Tujuan Kebijakan.....	9
2.3.3. Kebijakan Pendidikan	10
2.3.4. Infrastruktur Pendidikan.....	11
2.3.5. Sarana Prasarana.....	12
2.3.6. Macam-Macam Sarana Dan Prasarana	13
2.4. Kerangka Berfikir.....	15
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.2. Jenis Penelitian	17
3.3. Data dan Sumber Data.....	18
3.4. Fokus Penelitian	18
3.5. Teknik Pengumpulan Data	19
3.6. Uji Validitas Data.....	21
3.7. Teknik Analisis Data	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dinas pendidikan provinsi utara.....	25
4.1.1. Identitas Responden.....	28
4.1.2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	29
4.1.3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan	29
4.2. Kondisi Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah.....	30
4.3. Kebijakan Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana Prasarana	34
4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinas Pendidikan Provinsi	
4.5. Dalam Meningkatkan Infrastuktur Sarana Prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas.....	41

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	44
5.2. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	xii
----------------------	-----

LAMPIRAN	xV
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Penelitian Terdahulu	6
3.4.	Sumber Data Primer/Informan	19
4.1.	Identitas Reponden	29
	Jumlah responden berdasarkan berdasarkan dari jenis kelamin	
4.2.		29
4.3.	Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Berpikir Penelitian	15
4.1.	Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum sebagaimana yang telah didukung dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 Ayat 1 berbunyi “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.” Selanjutnya, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat 1 bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruangan belajar, tempat beribadah, tempat olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain dan ruangan lainnya yang mendukung proses pembelajaran.

Perkembangan pendidikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sekolah dapat beradaptasi dengan perubahan. kegiatan Pendidikan sekolah dipengaruhi salah satu aspek yaitu sarana dan prasarana yang harus terus dibina dan dikembangkan. Lembaga pendidikan dan infrastruktur dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor penting. Sarana dan prasarana pendidikan ini sebagai input pendidikan yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah (Depdiknas, 2007).

Sekolah sangat membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana

dalam menunjang proses belajar mengajar, adanya sarana dan prasarana yang baik maka proses belajar bisa dilaksanakan dengan baik juga. Sarana prasarana pendidikan dapat di artikan semua alat yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk memperlancar proses bimbingan, pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok, formal maupun nonformal guna mengubah tingkah laku dan pengetahuan individu dalam menjalani kehidupannya di masyarakat (Triyono, 2019:101).

Sarana dan prasarana yang sesuai akan memotivasi siswa. Belajar dan menerima pembelajaran. Kurangnya fasilitas belajar yang lengkap Hal ini dapat menjadi faktor yang menghambat pembelajaran. kesuksesan di sekolah Hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pelajar dan mahasiswa. Saya dicintai olehnya dan diri saya sendiri, tetapi saya masih memiliki banyak keinginan untuk belajar. Tidak nyambung dengan jiwa siswa. kurangnya kesadaran tentang Peran pendidikan di kalangan pelajar telah terancam dari generasi ke generasi Generasi pelapis bangsa. Secara tidak langsung fasilitas \belajar mempunyai dampak yang besar. Tentang berhasil atau tidaknya proses pembelajaran: peralatan yang tidak memadai Menjadi sulit bagi siswa untuk mulai belajar. Di sisi lain, mengenai peralatan dan standar, Pendidikan yang tepat meningkatkan keinginan belajar siswa. Jika Anda memiliki motivasi Karena Anda dapat melihat siswa Anda belajar, keberhasilan mereka tidak diragukan lagi. Keterlibatan pemerintah dalam wilayah pendidikan juga tidak harus dominan (sentralistis), pada pembangunan non-fisik semata-mata, tapi perlu kemudian dilakukan perimbangan yang adil antara pembangunan fisik dan

non-fisik. Posisi pendidikan di daerah yang bila berkecenderungan diskriminatif dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang bersandar pada nilai-nilai keadilan, kiranya membutuhkan perbaikan serta penyesuaian yang proporsional.

Sayangnya, masih banyak sekolah terpencil yang mengalami kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran infrastruktur sarana dan prasarana disekeliling sekolah masih jauh dari memadai, sehingga menghambat proses belajar mengajar. Pemerintah sering kali dinilai kurang adil dalam upaya peningkatan kualitas peningkatan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dengan cara mengukur hasil dari akhir dari program yang telah dilaksanakan serta membandingkannya dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Bila ditinjau kebelakang, sejenak apa yang sampaikan Ki Hajar Dewantara dalam (Mohammad Yamin, 2009) pendidikan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politik yang kerdil dan sempit, yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan bangsanya.

Dinas Pendidikan sebagai lembaga pendidikan dengan kebijakannya harus mengakomodir, merancang, melaksanakan, momonitor, serta mengevaluasi program pendidikan tidak terkecuali dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dinas pendidikan tingkat provinsi memiliki peran penting dalam mengelola sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab penuh serta

seluruh aspek operasional penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi sampai pada pengawasan yang dilakukan. Demikian halnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahwa memiliki peranan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting, dan bawasannya memiliki tanggung jawab serta mempunyai tantangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kalimantan Utara. Oleh karena itu, Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berorientasi pada pembangunan yang merata bagi setiap satuan pendidikan. Berawal dari pandangan bahwa pendidikan adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam rangka membangun bangsa secara utuh, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas.
- b. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai kebijakan institusi dan administrasi negara.
- 2) Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan di bidang administrasi negara, khususnya administrasi dan kebijakan pendidikan.
- 3) Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan institusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Menurut chaplin dalam Kartono (2008) menyatakan bahwa identifikasi adalah proses pengenalan , menetapkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Mengidentifikasi masalah sangat penting bagi peneliti supaya penelitian yang dikaji tidak lepas dari obyek penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Firadusi, Marsidin, & Sabandi (2020)	“Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar	memuat kajian pustaka tentang kebijakan sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007	implementasi kebijakan dari standar sarana dan prasarana seperti pengelolaan, pemanfaatan, inventarisasi, kendala dan dampak yang terjadi.

				Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang standar sarana dan prasarana di sekolah dasar.
2	Lestari, D. D. (2019)	Kebijakan dinas pendidikan kabupaten kudung kidul dalam peningkatan infrastruktur sarana prasarana di sekolah menengah atas	Menunjukkan bahwa kebijakan yang memfokuskan pada meningkatkan infrastruktur sarana prasarana di sma membawa dampak positif terhadap pencapaian belajar siswa	Adanya peningkatan fasilitas Pendidikan seperti laboratorium ruang belajar dan sarana prasarana lainnya merupakan faktor untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah
3	Aries fitriani (2017)	Dampak kebijakan dinas Pendidikan malang dalam peningkatan	Kebijakan dinas pendidikan yang memberikan prioritas pada	Kualitas sarana prasarana juga menunjukkan kualitas

		infrastruktur sarana prasarana terhadap motivasi belajar siswa	peningkatan infrastruktur sarana prasarana mampu memberikan motivasi siswa dalam belajar	sekolah yang baik dalam iklim belajar di sekolah
--	--	--	--	--

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang bijak oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam arti bahwa Keputusan yang diambil memiliki kepentingan masyarakat umum, keputusan yang paling ideal, keputusan yang mencerminkan etika atau keputusan yang adil. “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak”.

Kebijakan juga memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

2.3.2. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan tergantung pada bidang dan permasalahan yang menjadi fokusnya, namun secara umum tujuan kebijakan pada dasarnya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan kebijakan umum.

a. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat :

Banyak kebijakan dibuat untuk meningkatkan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Dengan pengertian seperti itu, sebenarnya upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat

b. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi:

Kebijakan ini dapat di rancang dari sumbangan Pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan social yang berbeda. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan hal yang positif dalam generasi masyarakat dalam spek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga semakin demokratis.

c. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi dapat bervariasi pada makro ekonomi dan mikro ekonomi tujuan setiap tingkatan tersebut untuk melihat perspektif yang berbeda:

1) Makro ekonomi membantu menganalisis trend jangka

Panjang dalam dasar pembuatan kebijakan dalam rancangan strategi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

- 2) Mikro ekonomi memahami perilaku ekonomi yang lebih spesifik dalam memberikan wawasan kepada agenda dalam mengambil keputusan dan beriteraksi di pasar.

2.3.3. Kebijakan Pendidikan

Kita sering mendengar tentang kebijakan pendidikan, namun belum sepenuhnya dipahami kebijakan dan Pendidikan mempunyai berbagai makna yang begitu luas dan bermacam macam. Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatuan antara teori dan praktek pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009). Berbicara tentang kebijakan pendidikan Arif Rohman (2009:109).

Bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

2.3.4. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur secara bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line disepadankan dengan kata prasarana. Hal ini didasarkan pada kata infrastruktur yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda. Dengan demikian infrastruktur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sistem infrastruktur adalah pendorong yang penting bagi berputarnya fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Warsilan & Noor, 2015). infrastruktur pendidikan merupakan pengelolaan terhadap infrastruktur atau prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman, jalan, lokasi, tanah, parkir, lapangan olahraga, drainase, instalasi listrik, internet, bangunan gedung, kantin, dan lain sebagainya (Ahmad Nurabadi, 2014). Sulistyorini medefinisikan tentang manajemen sarana prasarana sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana-prasarana pendidikan secara efektif dan efisien (Mustari, 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana

pendidikan adalah kegiatan pengelolaan oleh pemangku kepentingan mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pertanggungjawaban. infrastruktur pendidikan meliputi prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman, jalan, lokasi, tanah, parkir, lapangan olahraga, drainase, instalasi listrik, internet, bangunan gedung, kantin, dan lain sebagainya

2.3.5. Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Menurut Daryanto (2008) yang menyatakan bahwa prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Berhasil atau tidaknya suatu proses pencapaian tujuan yang diharapkan bersama dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan

yang sangat penting. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap baik guru maupun 13 siswa akan merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut dan dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Menurut Mulyasa (2004).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Fasilitas pembelajaran bertujuan untuk memudahkan penyusunan materi pendidikan dari segi semua jenis perangkat yang digunakan oleh guru dan siswa Memfasilitasi pengiriman dan penerimaan materi pendidikan. Berarti Pendidikan mengacu pada semua peralatan, perlengkapan, bahan dan furnitur yang memungkinkan pendidikan. Transfer dan gunakan langsung untuk pembelajaran di sekolah. di sisi lain, infrastruktur merupakan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung hal tersebut. Dalam proses pembelajaran di sekolah.

2.3.6. Macam-Macam Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan akan semakin sukses apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana Pendidikan memadai, sehingga pemerintah pun selalu berupaya untuk terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan salah satunya di jenjang pendidikan sekolah dasar.

Sarana pendidikan merujuk pada fasilitas fisik dan perangkat yang digunakan dalam lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup

berbagai jenis fasilitas yang berperan penting dalam mendukung proses belajar- mengajar contoh sarana pendidikan meliputi:

- a. Gedung sekolah: Tempat dimana siswa dan guru berkumpul untuk pembelajaran.
- b. Ruang kelas: Tempat di mana pengajaran berlangsung.
Perpustakaan: Tempat dimana siswa dapat mengakses sumber-sumber belajar.
- c. Laboratorium: Fasilitas khusus untuk eksperimen dan pembelajaran praktis.
- d. Taman bermain: area untuk kegiatan fisik dan rekreasi.
- e. Komputer dan perangkat teknologi: Untuk pembelajaran digital dan akses ke sumber daya online.
- f. Prasarana Pendidikan: Prasarana pendidikan lebih luas dalam lingkupnya.

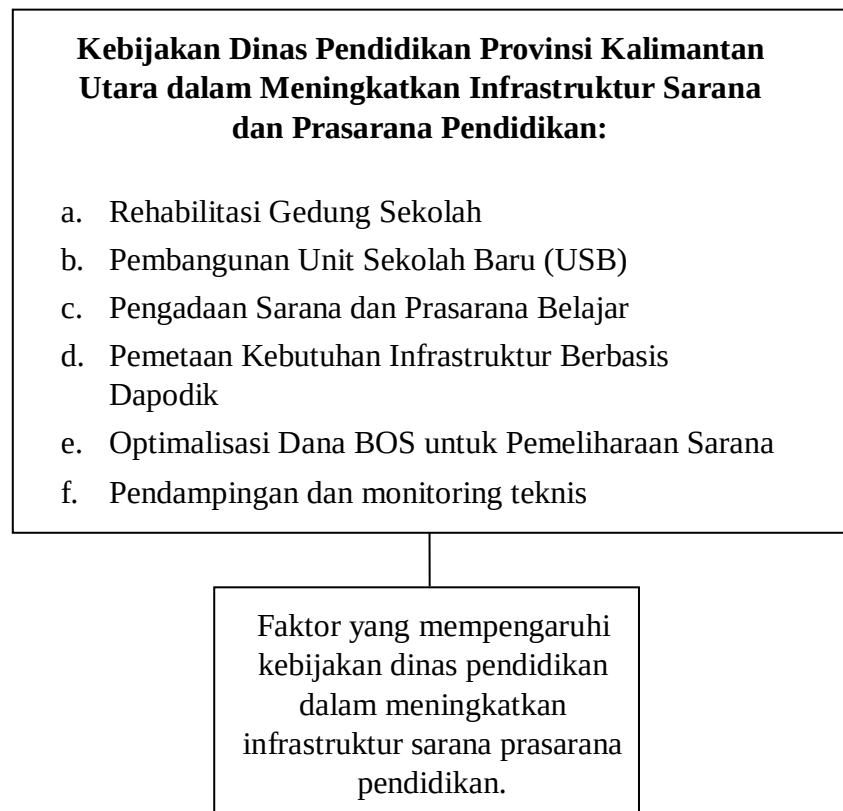
Selain sarana fisik, prasarana juga mencakup elemen-elemen seperti disebutkan dalam lapiran Permendiknas No.24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA) dijelaskan bahwa sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki 11 jenis prasarana sebagai berikut:

- 1) Ruang kelas, 2) Ruang perpustakaan,
- 3) Laboratorium , 4) Ruang pimpinan,

- 5) Ruang guru, 6) Tempat beribadah,
- 7) Ruang uks, 8) Jamban,
- 9) Gudang, 10) Ruang sirkulasi,
- 11) Tempat bermain/ berolahraga.

2.3.7. Kerangka Berfikir

Berikut gambar kerangka berpikir penelitian:



Gambar 2.1.
Kerangka berikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Zaluchu, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin

seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa mengobservasi secara detail dan melakukan wawancara langsung serta mendapatkan data yang lebih rinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati. Hal itu juga didukung dengan hal-hal yang akan dilakukan peneliti dengan mendeskripsikan apa saja yang diamati.

Lebih spesifik, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi literatur, yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menelaah teori, konsep, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tertentu. Dalam studi literatur, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengumpulkan, meninjau, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang valid dan terpercaya.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga dapat diartikan sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Oleh karena itu, fokus peneliti harus ditulis dan dijabarkan secara langsung dengan tujuan untuk dapat mempermudah peneliti sebelum mengadakan kegiatan observasi.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan

mana yang tidak relevan (Moleong, 2010).

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada:

- a. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Faktor yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sumber data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak pertama atau data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian.

Berikut ini daftar informen sebagai sumber data Primer yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.4.
Sumber Data Primer/Informan

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan	1
2	Sekretaris	1
3	Pengawas seksi sarana dan prasarana	1
4	Kepala Sekolah	1
5	Dokumen Resmi	-

- b. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitumelalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling starategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016:233).

- b. Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2010). Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlihat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen.

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa bentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa patung, gambar, dan film. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016:240).
- d. Documentary Analysis Yaitu menelaah isi dokumen guna mendapatkan isi pokok dan temuan penting.

3.6. Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan keabsahan data. Uji validitas data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan kata-kata yang dilaporkan oleh seorang peneliti. (Sugiyono, 2012). maka dari itu validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Triangulasi digunakan semata-mata digunakan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2015: 328). Triangulasi data yang digunakan berupa:

- a. Triangulasi sumber, artinya keabsahan data yang diperoleh agar mendapatkan informasi yang sesuai maka peneliti melakukan perbandingan melalui pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Agar memperoleh data yang berbeda dan hasil yang akurat maka peneliti melakukan wawancara terhadap siswa, guru dan kepala sekolah untuk keabsahan informasi.
- b. Triangulasi metode, peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan cara ricek crosscek kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu. Peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan melalui teori teori yang terkait dengan tema penelitian.
- c. Triangulasi waktu, waktu yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk mengetahui keakuratan data yang diperoleh selama wawancara dan

observasi lapangan.

3.7. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15)

Adapun teknik analisis data model interaktif yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman).

- b. Reduksi data mereduksi data berarti merangkum . memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya , sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan computer dengan meberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).
- c. Penyajian Data, Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.
- d. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan tersebut merupakan bagian dari analisis data yang selalu berkesinambungan dan tidak terpisakan dari analisis data sebelumnya. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan display data yang dilakuakn selama dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

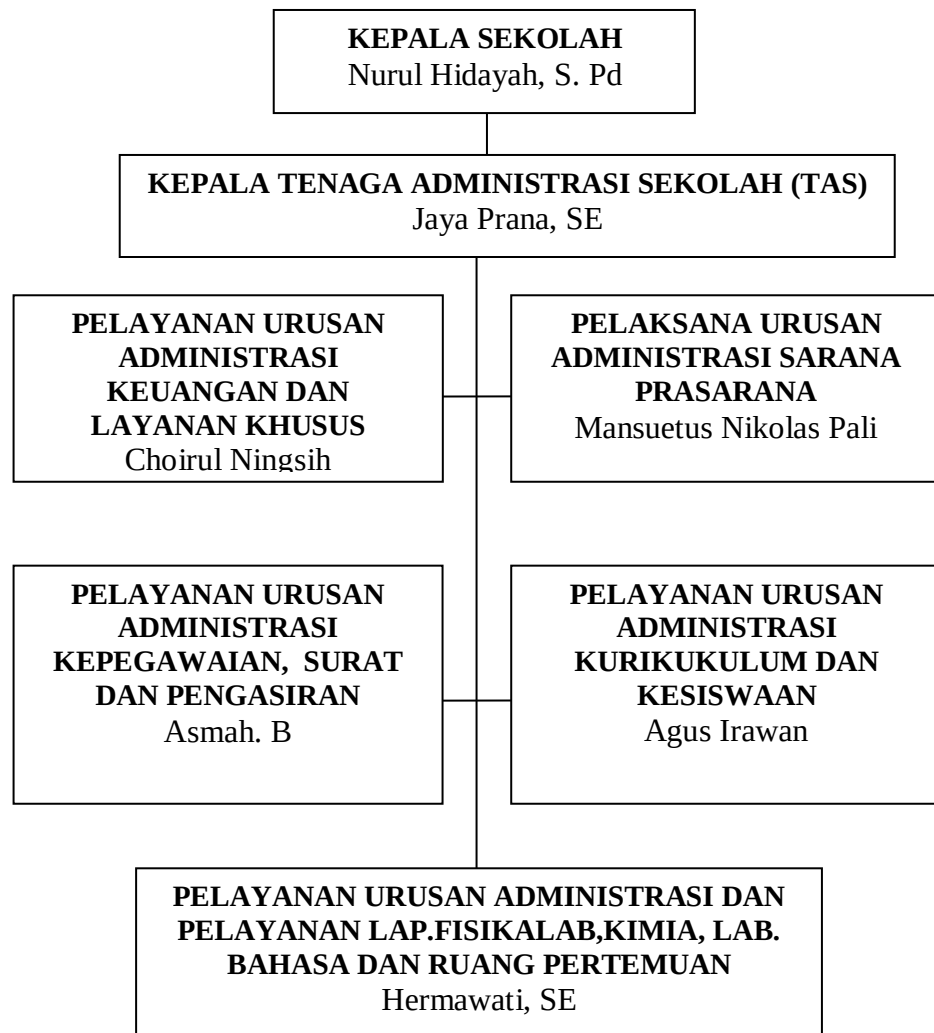
4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan provinsi. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara, termasuk pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta pendidikan layanan khusus.

Terkhususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang merupakan salah satu sekolah menengah atas di kabupaten bulungan yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sekolah ini berdiri sejak tahun 1961 dan telah terakreditasi A (SK NO. 1347/BAN-SM/SK2021 tanggal 8 desember 2021). Memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan penyediaan pendidikan menengah di wilayah tanjung palas. Berdasarkan data sekolah ajaran terakhir, jumlah siswa Kelas X=665, Kelas XI= 206, Kelas XII=243, dengan tenaga pendidik sebanyak 35 orang guru dan 10 tenaga pendidikan.

Visi : Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, unggul dan berwawasan lingkungan.

Misi : Sekolah antara lain meningkatkan kemampuan akademik dan non akademi, pembelajaran efektif, mengembangkan potensi siswa melalui literasi, laboratorium, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta membangun kesadaran peduli lingkungan.



Gambar 4.1.

Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas

Dari bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah

- 1) Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, pembinaan tenaga pendidik, serta pengelolaan sarana prasarana.
 - 2) Kepala sekolah berperan menetapkan kebijakan internal sekolah berdasarkan arahan dari dinas pendidikan provinsi Kalimantan Utara.
- b. Kepala tenaga administrasi sekolah (TAS)
- 1) Membantu kepala sekolah dalam hal administrasi dan manajemen sekolah.
 - 2) Mengkoordinasi seluruh staf administrasi agar tertip, rapi, dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
- c. Pelayanan urusan administrasi keuangan dan layanan khusus
- 1) Bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sekolah.
 - 2) Mengatur layanan administrasi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan mendesak sekolah.
- d. Pelaksana urusan administrasi sarana prasarana
- 1) Mengelola, memelihara, serta mengawasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah.
 - 2) Melaporkan pelaporan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas sekolah.
- e. Pelayanan urusan administrasi kepegawaian, surat dan pengarsipan
- 1) Mengatur kepegawaian, guru, staff, serta surat menyurat sekolah.

- 2) Menyimpan arsip resmi sekolah agar mudah ditelusuri kembali saat dibutuhkan.
- f. Pelayanan urusan administrasi kurikulum dan kesiswaan
- 1) Bertanggung jawab pada administrasi penyusunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
 - 2) Mengatur layanan administrasi kesiswaan, termasuk absensi, prestasi, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Pelayanan urusan administrasi dan pelayanan laboratorium (fisika, bahasa, kimia,) serta ruang pertemuan
- 1) Mengelola seluruh administrasi laboratorium sekolah agar bisa digunakan optimal oleh siswa.
 - 2) Menjaga inventaris siswa alat laboratorium dan fasilitas ruang pertemuan.

4.1.1. Identitas Responden Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun wawancara langsung dapat didisklarifikasikan mengenai keberadaan responden yang menjadi sumber peneliti sebagai analisis faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri Tanjung Palas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.

Identitas Responden Peneliti

No.	Umur/Tahun	Jumlah (N)	Persentase (%)
1	17 – 20 Tahun	6	20
2	25 – 30 Tahun	2	60
3	36 tahun ke atas	3	15
Jumlah		11	100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025

4.1.2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden dengan umur 17 – 20 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 20%, kemudian responden dengan umur 26 – 30 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 60%, kemudian responden dengan umur 36 tahun ke atas sebanyak 3 orang dengan persentase 15%.

Tabel 4.2.

Jumlah responden berdasarkan dari jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (N)	Persentase (%)
1	Laki-laki	7	74
2	Perempuan	4	26
Jumlah		11	100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025

4.1.3. Identitas Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut jenis kelamin lebih banyak jenis kelamin laki-laki dengan presentasi

jumlah responden 74% sedangkan responden dengan presentasi jenis kelamin perempuan sebesar 26%.

Tabel 4.3.

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (N)	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	7	86
2	Akademik/Sarana	4	14
Jumlah		11	100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025

Dari data di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah responden sebanyak 7 orang atau sebesar 86%, sedangkan 4 orang responden lainnya berpendidikan Akademik/Sarjana dengan persentase sebesar 14%.

4.2. Kondisi Infrastruktur Sarana dan Prasarana Sekolah

a. Kondisi Umum Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana sekolah merupakan komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, infrastruktur yang dimaksud mencakup bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung seperti toilet, air bersih, dan akses listrik.

Namun demikian, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah, khususnya sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung

Palas, masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana kondisi ruang belajar sebagian besar masih digunakan dengan baik, meskipun terdapat kerusakan ringan hingga sedang seperti plafon bocor dan fasilitas toilet yang perlu perbaikan perpustakaan, namun sebagian peralatan sudah usang, fasilitas internet tersedia tetapi masih belum stabil. Sarana olahraga berupa lapangan masih kurang terawat. Secara keseluruhan, sarana prasarana sekolah cukup terawat namun masih membutuhkan peningkatan dan perawatan agar optimal dalam menunjang pembelajaran.

b. Data dan Pengamatan Lapangan di SMA Negeri 1 Tanjung palas

Berdasarkan data hasil pengamatan lapangan :

- 1) Sekitar 45% sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung palas mengalami kerusakan ringan hingga berat pada bangunan fisik, terutama atap dan lantai.
- 2) Ruang kelas belajar tidak memadai di sebagian ruang sekolah yang jumlah siswanya terus meningkat. Satu ruang kelas sering digunakan secara bergantian oleh dua rombongan belajar.
- 3) Sekitar 35% ruang perpustakaan yang rusak, hanya berupa rak buku di ruang kelas atau ruang guru.
- 4) Laboratorium IPA dan komputer di jadikan satu akibat bangunan yang belum jadi dibuat, dengan alat yang sebagian besar sudah usang.
- 5) Fasilitas sanitasi (WC/toilet) masih belum ideal dan sebagian rusak, terutama dari segi rasio jumlah toilet dengan jumlah siswa dan sanitasi layak untuk siswa perempuan.

- 6) Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas belum memiliki akses internet stabil, dan bahkan ada sekolah yang belum mendapat aliran listrik permanen.

c. Penyebab Minimnya Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah

Beberapa penyebab utama kurangnya infrastruktur sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas:

- 1) Letak Geografis

Akses transportasi yang terbatas menghambat distribusi bahan bangunan dan peralatan pendidikan dan perlengkapan sekolah.

- 2) Keterbatasan Anggaran Daerah

Anggaran pendidikan dari pemerintah Provinsi dan kabupaten masih terbatas sebagai provinsi baru memiliki keterbatasan fiskal daerah. Pembangunan sarana prasarana sekolah sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan sering tertunda.

- 3) Minimnya Tenaga Teknis dan Sumber Daya

Dalam proses rehabilitasi atau pembangunan sekolah, seringkali terkendala oleh kurangnya tenaga teknis di yang memadai, sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan atau tidak sesuai hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan.

- 4) Pertumbuhan Jumlah Siswa yang Pesat

Jumlah siswa terus meningkat dari tahun ke tahun akibat peraturan zonasi wilayah, sedangkan pembangunan ruang kelas baru tidak sebanding dengan penambahan tersebut.

Akibatnya, ruang kelas sering bergantian dan kapasitas tidak memadai.

5) Birokrasi yang Panjang

Proses pengajuan bantuan dan realisasi pembangunan melalui mekanisme birokrasi yang cukup lama, hal ini menyebabkan keterambatan dalam pelaksanaan program pembangunan sekolah.

6) Kondisi Iklim dan Lingkungan

Beberapa fasilitas sekolah sering rusak rusak akibat faktor cuaca ekstrem, misalnya banjir dan kelembaban tinggi, sehingga perbaikan sulit dilakukan karena logistik yang terbatas.

d. Dampak Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap proses pembelajaran dan kesejahteraan warga sekolah:

- 1) Menurunnya kualitas pembelajaran, karena guru dan siswa tidak memiliki ruang belajar yang nyaman dan alat bantu pembelajaran yang lengkap.
- 2) Motivasi belajar siswa menurun, terutama bagi siswa-siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang harus belajar dalam kondisi ruang kelas rusak atau minim fasilitas.
- 3) Rendahnya capaian literasi dan numerasi, akibat kurangnya akses buku dan sarana belajar.
- 4) Kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran digital atau daring, terutama saat pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi, karena keterbatasan listrik dan jaringan internet.

Dari hasil wawancara, yang dilakukan oleh peneliti ke Ibu Nurul Hidayah, S.Pd. Sd selaku Kepala Sekolah Di SMA Negeri 1 Tanjung Palas menyampaikan :

“...Sekolah kami saat ini memiliki 19 ruang kelas, namun beberapa diantaranya sudah mengalami kerusakan seperti platfo bocor dan lantai retak sehingga perlu segera diperbaiki. Perpustakaan sekolah sudah ada, tetapi ruangan masih terbatas dan koleksi buku masih kurang untuk laboratorium komputer masih sangat terbatas dan masih banyak unit yang tidak berfungsi optimal.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Lebih lanjut beliau juga menambahkan :

“...Kami juga menghadapi fasilitas sanitasi, terutama toilet siswa yang belum sesuai dengan rasio jumlah murid. Selain itu, jaringan internet yang masih kurang stabil sehingga pembelajaran berbasis digital belum berjalan maksimal. Namun, kami tetap berupaya melakukan perawatan dengan menggunakan dan bo, meskipun terbatas.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Beliau juga menegaskan bahwa peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara sangat membantu :

“..Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir kami mendapatkan dukungan dari dinas pendidikan, baik melalui rehabilitasi ruang kelas, pengadaan peralatan belajar, maupun pembangunan ruang kelas baru. Kami berharap kedepannya lebih banyak bantuan yang difokuskan pada laboratorium komputer dan fasilitas sanitasi, karena ini sangat dibutuhkan siswa.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

4.3. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Infrastruktur

a. Landasan Kebijakan

Kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh kondisi geografis yang

menantang dan belum meratanya akses pendidikan di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pulau-pulau kecil. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Induk Pendidikan Nasional.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan utama dari kebijakan peningkatan infrastruktur pendidikan adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akses pendidikan menengah dan kejuruan di seluruh wilayah provinsi.
- 2) Menjamin mutu pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak.
- 3) Mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

c. Bentuk Kebijakan yang Dilaksanakan

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara menerapkan beberapa bentuk kebijakan konkrit untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan:

- 1) Rehabilitasi Gedung Sekolah

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, Dinas Pendidikan merehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang hingga berat. Prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah yang

berada di daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi dan keterbatasan akses. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan bapak H Sudarsono, Se., M. Pd. sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berikut:

“...Pemprov telah membangun berbagai sarana yakni pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas baru (RKB), serta sejumlah proyek renovasi seperti SMA 1 Tanjung Selor, SMA 1 Tanjung Palas, SMA 3 dan 4 Tarakan, serta SMK 2 Tarakan, menggunakan dana APBN dan APBD”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Selain itu, rehabilitasi gedung sekolah juga menjadi prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, guna dapat memberikan kenyamanan belajar.

2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. USB dibangun untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah, Namun untuk wilayah lainnya belum direncanakan pembangunan sekolah baru, sebagaimana wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berikut:

“...Untuk tahun 2025 tidak direncanakan pembangunan sekolah baru, kecuali jika ada anggaran. Fokus utamanya adalah penyelesaian gedung sekolah yang sudah dalam proses perencanaan atau konstruksi , selain itu pada 2024 Disdikbud merencanakan mendirikan tiga sekolah baru: dua SMA (di Betayau–Tana Tidung dan Seimenggaris) serta satu SMK. Salah satu kendala utama adalah pembebasan lahan, khususnya tanah hibah dari pemerintah daerah. Proses pengajuan hibah lahan untuk wilayah Seimenggaris dan Betayau sudah selesai, sementara untuk Kota Tarakan masih dalam proses ke DPRD. Perkiraan biaya pembangunan satu

unit sekolah baru minimal sekitar Rp 12 miliar, mencakup ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas ibadah...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar

Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan:

- 1) Meja dan kursi siswa
- 2) Peralatan laboratorium IPA dan komputer
- 3) Alat praktik untuk SMK
- 4) Perpustakaan dan buku ajar Kurikulum Merdeka
- 5) Perangkat pembelajaran berbasis TIK

Adapun prosedur pengadaan dapat dijelaskan sebagaimana hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan berikut:

“...Pengadaan sarana dan prasarana mengikuti perencanaan dari sekolah melalui sistem e-planning berbasis Dapodik. Setiap sekolah mengusulkan kebutuhan mereka berdasarkan kondisi real di lapangan. Usulan itu kemudian diverifikasi oleh tim kami, dan jika lolos, dimasukkan dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke pemerintah pusat. Pengadaan dilakukan oleh dinas atau melalui swakelola tipe III oleh sekolah penerima.”

“Kami prioritaskan yang mendukung kegiatan belajar langsung, seperti meja kursi siswa, papan tulis, proyektor, dan alat praktik. Untuk SMK, kami juga fokus pada peralatan laboratorium dan bengkel sesuai kompetensi keahlian. Beberapa sekolah juga mengusulkan pengadaan jaringan internet dan laptop untuk mendukung digitalisasi pembelajaran...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

e. Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Dapodik

Dengan memanfaatkan data Dapodik dan e-Sarpras, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berbasis data

akurat. Setiap tahun, sekolah diminta untuk memperbaharui data kondisi sarana-prasarana untuk dasar pengajuan bantuan.

Pemetaan berbasis Dapodik adalah proses dalam mengidentifikasi kebutuhan fisik sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, WC, hingga meubelair, berdasarkan data yang diinput oleh sekolah secara berkala melalui sistem Dapodik. Data ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas bantuan infrastruktur di tahun berjalan.

Dalam proses pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah harus mengacu pada Dapodik sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam wawancara berikut:

“...Data dari Dapodik sangat krusial. Pemerintah pusat pun mensyaratkan usulan DAK Fisik hanya dapat diajukan jika data sekolah di Dapodik lengkap dan valid. Maka dari itu, semua program bantuan—baik dari pusat maupun provinsi—merujuk ke Dapodik sebagai sumber utama.”

“Setelah sekolah menginput data, kami akan melakukan verifikasi faktual, baik melalui kunjungan langsung maupun validasi foto dan dokumentasi. Tim kami mencocokkan apakah data yang diinput sesuai dengan kondisi di lapangan, karena kadang sekolah melaporkan kekurangan ruang padahal fisiknya masih bisa digunakan.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

f. Optimalisasi Dana BOS untuk Pemeliharaan Sarana

Dinas mendorong sekolah agar mengalokasikan sebagian Dana BOS untuk perawatan ringan fasilitas sekolah secara mandiri, sehingga pembangunan yang sudah dilakukan tetap terpelihara.

Adapun penggunaan dana bos untuk perawatan sarana diperbolehkan secara regulasi dalam batasan tertentu, berikut penjelasan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kalimantan

Utara:

“...Secara regulasi, penggunaan Dana BOS untuk pemeliharaan sarana diizinkan, maksimal **20% dari total anggaran BOS Reguler**. Kami dari dinas hanya bisa memberikan panduan umum, karena pengelolaan dana BOS bersifat langsung oleh sekolah. Namun, kami mendorong agar dana itu digunakan untuk perawatan ringan seperti perbaikan plafon, pengecatan, dan perawatan WC atau meubelair...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

g. **Pendampingan dan Monitoring Teknis**

Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas PUPR dan konsultan pengawas untuk melakukan pendampingan teknis dalam pembangunan fisik, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

h. **Analisis Efektivitas Kebijakan**

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan serta kepala sekolah penerima bantuan, kebijakan-kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak positif, seperti:

- 1) Meningkatnya jumlah ruang kelas yang layak.
- 2) Tersedianya laboratorium dan peralatan praktik di sejumlah SMK.
- 3) Meningkatnya kehadiran siswa karena fasilitas yang lebih nyaman dan aman.
- 4) Terbukanya akses pendidikan di wilayah-wilayah baru melalui pembangunan USB.

Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti:

- 1) Proses birokrasi dan tender pengadaan yang memakan waktu lama.
- 2) Keterlambatan pencairan DAK.
- 3) Lemahnya kapasitas teknis kepala sekolah dalam mengelola proyek fisik.
- 4) Tantangan geografis dalam pengangkutan bahan bangunan ke daerah terpencil.

i. **Pendekatan Analisis George C. Edward III**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, dapat digunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama:

1) **Komunikasi**

Penyampaian kebijakan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah berjalan melalui rapat koordinasi dan sistem aplikasi daring. Namun, di daerah dengan keterbatasan sinyal, komunikasi menjadi kendala.

2) **Sumber Daya**

Tersedianya anggaran DAK Fisik dan BOS menjadi kekuatan utama. Namun keterbatasan SDM teknis, terutama dalam perencanaan dan pengawasan proyek fisik, masih menjadi tantangan.

3) **Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Komitmen kepala dinas dan pelaksana program tergolong tinggi. Namun, pada tataran implementasi, sikap dan pemahaman teknis kepala sekolah dan panitia pembangunan masih bervariasi.

4) **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi Dinas Pendidikan sudah mendukung implementasi program. Namun diperlukan koordinasi lebih kuat dengan OPD teknis seperti Dinas PUPR serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

j. **Implikasi Kebijakan**

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ini memiliki implikasi penting:

- 1) **Secara sosial**, memperluas akses pendidikan di daerah yang sebelumnya belum terlayani.
- 2) **Secara ekonomi**, mendukung peningkatan kualitas SDM lokal yang siap bersaing.
- 3) **Secara politik**, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, untuk keberlanjutan kebijakan, diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinas Pendidikan Provinsi Dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah Di SMA Negeri 1 Tanjung Palas

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai beberapa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas beberapa faktor tersebut dapat diekspikasikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk memajukan pendidikan, khususnya alokasi anggaran pendidikan dan program rehabilitasi sekolah.

2) Kebijakan Nasional Dan Daerah

Adanya landasan hukum seperti UU nomor 20 tahun 2003, Permendiknas nomor 24 tahun 2007, RPJMN, serta Resntra Dinas Pendidikan yang menekankan pemerataan sarana prasarana pendidikan

3) Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana DAK pendidikan dari pemerintah pusat menjadi sumber utama dalam pembangunan ruang kelas, laboratorium, serta peralatan belajar.

4) Partisipasi Masyarakat Dan Komite Sekolah

Dukungan masyarakat dan Komite Sekolah turut membantu dalam pengadaan maupun pemeliharaan sarana pendidikan

5) Data Dapodik Yang Akurat

Adanya sistem Dapodik mempermudah pemetaan kebutuhan sekolah, sehingga pengajuan bantuan lebih terarah dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula hambatan yang mempengaruhi realisasi kebijakan dalam menyusun, melaksanakan dan

mengevaluasi program kerja sekolah, pengetahuan administrasi sekolah yang dikuasai kepala sekolah masih kurang, kurang optimalnya proses belajar di sekolah, kurang optimalnya dalam penyusunan anggaran yang disebabkan alokasi penggunaan ruang secara full time, dan kurang optimalnya peran serta masyarakat.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah, S.Pd. Sd Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas sehubungan dengan hal tersebut:

“...Kendala yang kami hadapi sebagai pendidik adalah lemahnya manajemen dan supervisi sekolah, terutama dalam hal penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sekolah, selain itu, proses belajar mengajar disekolah juga belum berjalan optimal karena beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur sarana prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan sekolah ekstrakurikuler disebabkan karena penggunaan ruang kelas yang full time, kurangnya pemahaman tentang administrasi sekolah, dan kurang optimalnya peran serta masyarakat terutama pemahaman masyarakat.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Selanjutnya dideskripsikan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas kendala dalam menjalankan peran sebagai pemimpin adalah:

- 1) Penurunan disiplin kinerja guru;
- 2) Permasalahan kualitas tenaga pendidik;
- 3) Masalah metode dan evaluasi pembelajaran;
- 4) Permasalahan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

“...Kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pembelajaran maupun perkembangan/kemajuan sekolah diantaranya adalah penurunan disiplin kinerja guru, adanya permasalahan terkait kualitas tenaga kerja pendidik, kendala dalam penerapan metode serta evaluasi pembelajaran, dan juga keterbatasan sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Hal ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan supervisor tergolong cukup kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan atensi yang intensif dan berkelanjutan baik dari kepala sekolah itu sendiri maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemangku kebijakan, khususnya dalam hal peningkatan infrastruktur sarana prasarana sekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis kebijakan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kondisi infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas:
sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan seperti ruang kelas rusak, perpustakaan sempit, laboratorium komputer dan IPA belum optimal, toilet siswa kurang memadai dan sebagian masih rusak, serta jaringan internet yang tidak stabil.
- b. Kebijakan Dinas Pendidikan Mengarah pada Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah merancang dan melaksanakan sejumlah kebijakan alternatif untuk menjawab persoalan tersebut. Beberapa program strategis yang dilakukan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sekolah Rusak melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - 2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang belum memiliki sarana prasarna SMA/SMK.

- 3) Pengadaan peralatan laboratorium, peralatan praktik, dan sarana belajar TIK.
- 4) Pemanfaatan data Dapodik dan e-Sarpras untuk perencanaan pembangunan fisik yang berbasis data kebutuhan nyata.
- 5) Pendampingan teknis pembangunan melalui kerja sama lintas sektor seperti Dinas PUPR dan Inspektorat Daerah.

Dengan kebijakan tersebut, terlihat adanya komitmen Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dari aspek infrastruktur.

c. Pelaksanaan Kebijakan Masih Menghadapi Berbagai Tantangan di lapangan meski arah kebijakan sudah tepat, pelaksanaan program masih menemui sejumlah kendala teknis dan struktural yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran daerah, sehingga ketergantungan pada bantuan pusat (DAK) cukup tinggi.
- 2) Kesulitan geografis dan transportasi, menyebabkan pembangunan fisik sering tertunda, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman yang sulit dijangkau.
- 3) Kurangnya tenaga teknis dan SDM pelaksana di tingkat sekolah, seperti kepala sekolah dan tim pengelola proyek, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan proyek fisik.
- 4) Koordinasi antar-OPD belum optimal, terutama dalam perencanaan lintas sektor pembangunan pendidikan.

Hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secepat yang diharapkan, dan belum mendapatkan manfaat secara merata.

d. Efektivitas Implementasi Kebijakan Berdasarkan George C. Edward III

Komunikasi sudah terjalin namun terkendala, sumber daya terbatas, disposisi pelaksana cukup baik, dan struktur birokrasi sudah mendukung meski perlu penguatan koordinasi lintas instansi.

e. Implikasi Kebijakan

Kebijakan ini memiliki dampak positif dalam jangka pendek dan panjang:

- 1) Dalam jangka pendek, fasilitas sekolah yang lebih layak mampu meningkatkan motivasi siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.
- 2) Dalam jangka panjang, pemerataan infrastruktur akan mendukung peningkatan kualitas SDM lokal dan mengurangi ketimpangan wilayah.
- 3) Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi dalam menjamin hak pendidikan warga negara, sesuai amanat konstitusi.

f. Keseluruhan Evaluasi

Secara keseluruhan, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dapat dikatakan telah berjalan ke arah yang positif, namun belum sepenuhnya optimal.

Langkah-langkah strategis sudah diambil, namun keberhasilannya masih sangat dipengaruhi oleh faktor internal (SDM, anggaran) dan eksternal (aksesibilitas wilayah, koordinasi antar instansi). Ke depan, upaya evaluasi berkala dan perencanaan berbasis data menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas..

5.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas:

- a. Meningkatkan Akurasi dan Pemutakhiran Data Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas diharapkan untuk secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kondisi fisik sekolah melalui kunjungan lapangan dan pelaporan berbasis aplikasi (seperti Dapodik dan e-Sarpras).

Data yang akurat sangat penting sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan serta rehabilitasi sekolah.

1) Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor

Diperlukan peningkatan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda, serta pihak kecamatan dan desa. **Koordinasi yang kuat** akan mempermudah

pelaksanaan pembangunan fisik, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta menjamin kualitas infrastruktur sesuai standar teknis.

2) Meningkatkan Kapasitas SDM sekolah

Dinas Pendidikan perlu memberikan pelatihan manajemen pembangunan dan pengelolaan sarpras bagi kepala sekolah, bendahara BOS, dan panitia pembangunan. Hal ini penting agar pihak sekolah mampu menyusun RAB, mengawasi proyek fisik, dan melakukan pelaporan dengan tertib dan transparan.

3) Menyediakan Skema Pembiayaan Alternatif dan Inovatif

Selain mengandalkan DAK dan BOS, Dinas Pendidikan dapat mengeksplorasi sumber pendanaan lain seperti:

- a) Kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR.
- b) Pemanfaatan Dana Desa untuk dukungan pembangunan ruang kelas.
- c) Dana hibah dari lembaga donor atau mitra pembangunan.

skema ini dapat memperluas cakupan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada APBD yang terbatas.

b. Mempercepat Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi

Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan utara perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dan real-time, agar progres pembangunan dapat dipantau secara cepat

dan akurat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan.

- c. Mengintegrasikan Infrastruktur dengan Inovasi Pembelajaran
Pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada penyesuaian sarpras dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka, seperti ruang proyek, ruang literasi, dan pembelajaran berbasis digital. Ini akan menjadikan kebijakan lebih relevan dengan tantangan pendidikan masa kini.
- d. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sarpras Pemerintah Provinsi perlu menyusun Rencana Induk (Masterplan) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 5–10 tahun ke depan, yang mengintegrasikan faktor demografi, perkembangan teknologi, pertumbuhan sekolah, dan arah pembangunan wilayah.
- e. Menjamin Keberlanjutan dan Pemeliharaan Fasilitas yang Telah Dibangun
Setelah pembangunan selesai, perlu ada program pemeliharaan berkala serta pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi optimal. Dinas Pendidikan dapat menetapkan pedoman penggunaan Dana BOS untuk pemeliharaan ringan yang fleksibel dan efisien.
- f. Menjalin Kemitraan Aktif dengan Komunitas dan Dunia Usaha
Dalam konteks, Dinas Pendidikan dapat menjalin kemitraan aktif dengan industri lokal dan BUMN untuk pembangunan ruang praktik, donasi

peralatan, dan pelatihan guru. Kerja sama ini penting untuk menciptakan link and match antara sekolah dan kebutuhan dunia kerja.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kebijakan dinas pendidikan dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga kualitas sekolah dapat meningkat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, J., Sutrisno, H.H., Triyono. (2019). The Effort to Increase the Awareness of the Danger of Fire by Using a Daily Assessment on the Safety Level of the Evacuation Route in Apartments (Vertical Housing). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8: 556-560.
- Daryanto, 2008, Administrasi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, 2008, Pemimpin dan Kepemimpinan, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- LexyJ.Moleong.2007.MetodePenelitianKualitatif.Bandung:RemajaRosdakarya.
- LexyJ.Moleong.2010.MetodePenelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E.(2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. (2014). Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurabadi, Ahmad. 2014. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Malang :

Universitas Negeri Malang.

Sugiyono.2010.“MetodePenelitian KuantitatifKualitatif”DanR&D. Bandung:
Alfabeta

Sugiyono.2012.MetodePenelitian Pendidikan.Bandung:Alfabeta

Sugiyono.2016.“MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif ”Dan R&D. Bandung:
Alfabeta

Yamin, Martinis. 2008. Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan
Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Press.

Warsilan and Noor, A. (2015) ‘Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota
Samarinda’, MIMBAR, 31(2), pp. 359–366.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional
Pasal 45 Ayat 1.

PeraturanUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat 1.

Permendiknas No 24 Tahun 2007, Prasarana Merupakan Dasar Fasilitas Dasar
Untuk Menjalan Fungsi Sekolah/Madrasah (Dediknas 2007).

Permendiknas No. 24 Tahun 2007, prasarana

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 420/1755 /Disdikbud/Ku/V/2o21 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

nonim, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dharma Bhakti. Jakarta

Anonim, Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta

Anonim, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 279 Tahun 2003 tentang Tugas dan

Fungsi Kantor Kelurahan Kabupaten Konawe.

Amirin, Tatang M. 1990. Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Press Jakarta

Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia

Indonesia. Jakarta

Kartono, Kartini. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. Rajawali Press. Jakarta

Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur

Pemerintah. Universitas Tadulako Palu

Sawe, Jamaluddin. 1996. Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan. APDN Press.

Bandung

Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Ghalia Indonesia. Jakarta

SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 18/US.10.4.51/PPG.03/II/2025 Tanjung Selor, 18 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Zakariansyah
NPM : 201851055
Semester : XIII (tiga belas)
Metode Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 19 Februari s.d 19 April 2025
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA**
(Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Iskandar, S. Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SMA NEGERI 1 TANJUNG PALAS

Jl. Pramuka, RT.II Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan,
Prov. Kalimantan Utara, Kode Pos 77216, Website: <https://sman1tgpalas.sch.id>
NSS : 30.1.16.04.01.001 Email : sman1tgpalas@gmail.com NPSN : 30402593



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3.8.5 / 0772 / KESRA / SMAN.1 / VII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zakariansyah**

NIM : 201851055

Fakultas : Universitas Kaltara (Unikal)

Judul Penelitian : Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana Prasarana

telah melaksanakan tugas penelitian dengan baik di SMA Negeri 1 Tanjung Palas sesuai prosedur / peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Palas, 2 Juli 2025
Kepala Sekolah

Nurul Hidayah, S.Pd
NIP 19730405 200502 2 002

PEDOMAN WAWANCARA
KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DALA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
SARANA PRASARANA SEKOLAH
(STUDI PADA SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG
PALAS)

A. Identitas Wawancara

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :
5. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

1. Seperti apakah cara Bagaimana kebijakan dinas pendidikan dalam meningkatkan nrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas?
2. Apa saa program prioritas yang sudah atau sedang dilaksanakan untuk sma negeri 1 tanjung palas?
3. Pertanyaan; bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap kondisi sarpras sma negeri 1 tanjung palas?
4. Bagaimana keadaan kondisi sarana prasarana di sekolah ibu saat ini?
5. Apa saja faktor pendukung yang membantu dalam telaksananya kebijakan tersebut?
6. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakanakan kebijakan pembangunan arana prasarana?

